



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu disusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan.
- b. bahwa RPJP daerah disusun melalui proses yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJP Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 - 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005 – 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Tasikmalaya dan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025.

- (2) RPJP Daerah disusun sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (3) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dan pedoman bagi proses pembangunan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, antara daerah dengan provinsi, antara daerah dengan pusat, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengupayakan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB IV PENJABARAN RPJP DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Oktober 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 89

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 9 Tahun 2008
TANGGAL : 13 Oktober 2008

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 – 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENGANTAR

1. Pembentukan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90), memiliki luas wilayah 17.156,20 ha atau 171,56 km², terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Mangkubumi. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten, yaitu :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108° 08' 51,62" - 108° 18' 31,77" BT dan 7° 14' 14,64" - 7° 27' 2,5" LS, sehingga cukup strategis karena berada pada poros lalulintas di bagian selatan Pulau Jawa.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Priangan Timur. Saat ini kecenderungan arah perkembangan Kota Tasikmalaya yang terkuat, meliputi 3 sumbu arah perkembangan, yaitu :

- a. Sumbu Tasikmalaya – Cikoneng – Ciamis;
- b. Sumbu Tasikmalaya – Cisayong,
- c. Sumbu Tasikmalaya – Singaparna.

Sumbu-sumbu perkembangan tersebut mengikuti keberadaan jaringan jalan utama yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan wilayah sekitarnya.

2. Proses Penyusunan

Penyusunan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan dalam upaya mengantisipasi dinamika pembangunan di Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025, Oleh sebab itu rangkaian proses penyusunan RPJP Daerah harus mewakili seluruh kepentingan dan komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Proses penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyiapan rancangan RPJP Daerah, dilaksanakan untuk mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap rancangan RPJP Daerah;
- c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, dilakukan untuk memperoleh rancangan akhir RPJP Daerah dengan memperhatikan seluruh masukan dan kesepakatan yang dihasilkan pada Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- d. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

3. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- a. RPJP Daerah mempunyai kedudukan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2005 - 2025. Penyusunan RPJP Daerah mempertimbangkan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- b. RPJP Daerah merupakan perwujudan kehendak seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, oleh sebab itu RPJP Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di segala bidang.
- c. Arah kebijakan kewilayahan yang tertuang dalam RPJP Daerah mengacu kepada RTRW Kota Tasikmalaya yang merupakan rencana dan arah pemanfaatan ruang serta aktivitas kegiatan dalam pembangunan daerah sampai tahun 2014. RTRW tersebut merupakan *blue print* dalam pemanfaatan seluruh sumberdaya, yang akan diimplementasikan dalam

ruang dan lahan, baik sebagai suatu kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

- d. Penyusunan RPJP Daerah memperhatikan Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002-2007 yang berisi nilai, visi dan misi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2012. Visi Kota Tasikmalaya dalam Renstra tersebut adalah “Dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Priangan Timur Tahun 2012”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) misi utama pembangunan Kota Tasikmalaya, yaitu :

- 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan taqwa;
- 2) meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum;
- 3) menumbuhkan kekuatan ekonomi kota;
- 4) menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih;
- 5) menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan;
- 6) mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
- 7) membangun dan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada arah pembangunan Nasional dan arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. RPJP Daerah disusun dalam rangka mengantisipasi arah pembangunan daerah tahun 2005 -2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJP Daerah ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan acuan serta pedoman bagi proses pembangunan jangka menengah di Kota Tasikmalaya serta penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai tahun 2025.

Tujuan RPJP Daerah adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, berkeadilan sosial, serta akuntabel, sehingga dapat melindungi kebebasan dan hak asasi masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum. Hal tersebut merupakan prasyarat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

D. TATA URUT

Tata urut penulisan RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025

Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab V Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

A. KONDISI SAAT INI

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

- a. Kondisi geomorfologi merupakan keadaan yang harus diterima sebagai anugerah pada suatu wilayah. Interaksi antara alam dan kegiatan manusia pada akhirnya akan membawa dampak pada kondisi lingkungan hidup di wilayah yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori dataran sedang, dengan ketinggian wilayah berada pada ketinggian 201 mdpl (di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu) sampai 503 mdpl (di Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang). Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya dalam arah Barat Laut ke arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat gambar 2.1). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologinya, dimana Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini membawa permasalahan dalam sistem drainase dan sistem perpipaan air Kota Tasikmalaya, sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih matang terhadap kedua sistem tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Gambar 2.1.
Titik Ketinggian dan Aliran Air di Kota Tasikmalaya



c. Kondisi geomorfologi wilayah dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Kondisi aliran sungai (khususnya di sepanjang aliran sungai Kecamatan Kawalu, Mangkubumi yang mengarah ke DAS Ciwulan dan sepanjang aliran sungai di Kecamatan Cibeureum dan Indhiang yang mengalir mengarah ke DAS Citanduy) merupakan hal yang harus diwaspadai dalam perencanaan pembangunan kota di masa yang akan datang. Kondisi aliran sungai di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Kondisi Aliran Sungai di Kota Tasikmalaya



d. Kondisi kemiringan lereng di Kota Tasikmalaya pada dasarnya tidak begitu mengkhawatirkan bagi perkembangan perluasan kota di masa yang akan datang (lihat tabel 2.1). Data kondisi kemiringan lereng di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) luas lahan dengan kemiringan diatas 17- 45% adalah 10,85% dari total luas wilayah (sebagian besar berada di pinggir sungai dan berbentuk hutan);
- 2) luas lahan dengan kemiringan 9-17%, adalah 17,56% dari total luas wilayah;
- 3) luas lahan dengan kemiringan dibawah 9% adalah 71,59% dari total luas wilayah.

Kondisi demikian masih memungkinkan untuk perkembangan kota dengan menggunakan sedikit teknologi yang tidak terlalu sulit dan mahal. Berdasarkan analisis kemungkinan lahan terbangun, maka di Kota Tasikmalaya masih mungkin untuk berkembang seluas 5.181,3 Ha (sekitar 30,2% dari total luas wilayah), dengan asumsi bahwa hutan (16,8%) sebagai daerah konservasi dan sawah irigasi (29,96%) tidak akan terkonversi sebagai akibat pengembangan kota di masa yang akan datang.

Tabel 2.1.
Kondisi Kemiringan Lereng Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Keterangan	Luas (Hektar)	% Luas
0 - 3	Datar	8.640,95	50,37
3 - 9	Landai	3.640,85	21,22
9 - 17	Sedang	3.012,54	17,56
17 - 45	Curam	1.861,86	10,85
Total		17.156,20	100,00

e. Sebagai daerah yang berdekatan dengan gunung api yang masih aktif, Kota Tasikmalaya memiliki beberapa wilayah yang rawan terhadap bencana. Oleh sebab itu pembangunan di masa yang akan datang diharapkan dapat mempertimbangkan informasi mengenai mitigasi bencana. Daerah rawan bencana di Kota Tasikmalaya terutama dapat dilihat dari sisi pergerakan tanah yang tinggi dan aliran lahar (lihat area berwarna hijau pada gambar 2.3).

Gambar 2.3.
Daerah Rawan Bencana di Kota Tasikmalaya



- f. Pemanfaatan situ yang kurang terencana dan terkendali dengan baik di Kota Tasikmalaya menyebabkan sebagian besar berada dalam kondisi rusak berat, sehingga diperlukan kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi tersebut agar fungsi situ sebagai salah satu daerah tangkapan air bisa dikembalikan.
- g. Kondisi Kota Tasikmalaya (berdasarkan rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, regional Jawa Barat maupun Kota Tasikmalaya) yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), telah meningkatkan aksesibilitas Kota Tasikmalaya terhadap kota-kota lain disekitarnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya arus lalu lintas di Kota Tasikmalaya yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap kualitas lingkungan (sebagai akibat dari gas buang kendaraan, dan permasalahan limbah sebagai akibat dari aktivitas kegiatan yang ada).
- h. Aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan terkait erat dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pendirian rumah hunian, dan pendirian bangunan liar. Hal ini perlu menjadi perhatian karena perkembangan penduduk yang tinggi, ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,11%.
- i. Pengawasan lingkungan yang sedikit lemah menyebabkan terjadinya berbagai persoalan lingkungan, seperti hilangnya beberapa bukit akibat aktivitas galian C, pencemaran sungai oleh limbah cair dari rumah sakit dan industri, serta penyedotan air tanah yang terkendali menyebabkan turunnya muka air tanah pada beberapa tempat di Kota Tasikmalaya.

2. Demografi

Kota Tasikmalaya sebagai wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah yang terdiri dari 8 kecamatan. Dengan jumlah kecamatan sebanyak ini terlihat bahwa jumlah penduduk relatif jauh di bawah daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan populasi sebesar 537.952 jiwa, dapat dikatakan bahwa Kota Tasikmalaya masih cukup terkendali ditinjau dari aspek kependudukan yang umumnya dapat menjadi faktor penghambat pembangunan daerah. Seringkali justru dalam kenyataannya daerah-daerah yang sedang membangun mengalami penurunan kapasitasnya karena adanya tekanan dari ledakan jumlah penduduk, baik itu yang berasal dari pertumbuhan alamiah maupun dari migrasi-masuk seperti yang terjadi di Bogor, Depok, Bekasi, Cirebon dan Bandung Raya.

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kota Tasikmalaya menunjukkan hanya Kecamatan Cihideung dan Tawang yang memiliki densitas lebih dari 10.000 jiwa/km². Sementara kecamatan lainnya relatif lebih kecil dan yang terendah ada pada Kecamatan Kawalu dan Tamansari. Secara geografis, Kecamatan Kawalu dan Tamansari merupakan bagian selatan kota yang bersebelahan dengan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga relatif bukan merupakan jalur transportasi dan transit utama dari adanya mobilitas penduduk. Sementara untuk Cihideung dan Tawang memang merupakan wilayah yang terlewati oleh jalur transportasi utama dimana terdapat jalan kabupaten dan jalan provinsi. Lihat tabel dibawah.

Tabel 2.2.
Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Rata-Rata Kota Tasikmalaya Tahun 2005

Nama Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km ²)
1) Kawalu	41,12	82.332	2.002
2) Tamansari	28,52	58.292	2.044
3) Cibeureum	29,41	93.671	3.185
4) Tawang	5,33	65.957	12.375
5) Cihideung	5,30	71.829	13.553
6) Mangkubumi	23,68	77.337	3.266
7) Indihiang	30,10	82.379	2.737
8) Cipedes	8,10	76.486	9.443
J u m l a h	171,56	608.283	3.546

Sumber : Monografi dan Profil Kecamatan Tahun 2005

Pada tabel 2.3 dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di tiap kecamatan, dimana secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

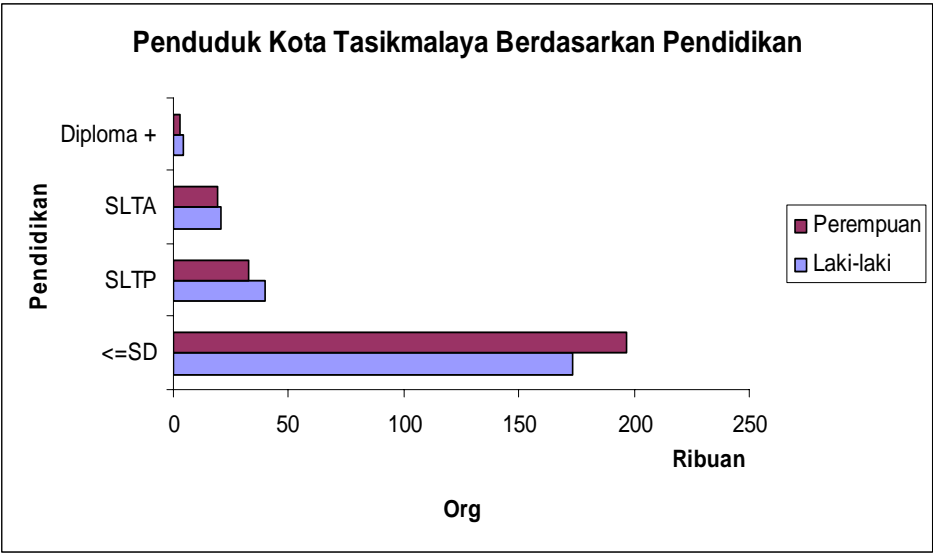
Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Tasikmalaya, Tahun 2002-2004

Kecamatan	2002			2003			2004		
	Laki2	Perempuan	Total	Laki2	Perempuan	Total	Laki2	Perempuan	Total
Kawalu	35,299	35,143	70,442	39,134	37,716	76,850	40,991	39,436	80,427
Tamansari	25,459	25,488	50,947	28,349	27,026	55,375	29,205	27,771	56,976
Cibeureum	43,621	43,687	87,308	46,547	44,709	91,256	46,720	44,774	91,494
Tawang	29,264	31,038	60,302	31,247	30,945	62,192	32,445	32,024	64,469
Cihideung	32,982	34,122	67,104	33,878	33,178	67,056	35,388	34,561	69,949
Mangkubumi	33,843	34,464	68,307	37,029	35,679	72,708	38,363	36,962	75,325
Indihiang	37,543	39,139	76,682	41,093	39,748	80,841	41,020	39,629	80,649
Cipedes	33,102	33,382	66,484	35,363	34,446	69,809	37,487	36,268	73,755
Jumlah	271,113	276,463	547,576	292,640	283,447	576,087	301,619	291,425	593,044

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2002-2004

Sementara bila dilihat dari aspek pendidikan penduduk, akses masyarakat terhadap pendidikan masih didominasi pendidikan sekolah dasar, dengan komposisi laki-laki lebih sedikit prosentasenya daripada perempuan. Tetapi semakin tinggi pendidikan, tren ini berubah dimana perempuan mendapatkan prosentase yang lebih kecil daripada laki-laki. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pada segmen usia produktif, penduduk cenderung memilih bekerja ataupun migrasi keluar kota. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa adanya kondisi jender yang masih harus ditingkatkan dan lebih baik di Kota Tasikmalaya meskipun rasio laki-laki dan perempuan hampir sama sehingga gambaran saat ini mencerminkan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's). Lihat gambar berikut.

Gambar 2.4.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan



3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Meskipun perkembangan perekonomian yang terjadi di Kota Tasikmalaya telah membawa perbaikan pada kondisi pendapatan penduduknya, namun secara umum peningkatan tersebut masih berada di bawah pendapatan Provinsi Jawa Barat. Pendapatan rata-rata penduduk (yang diukur dari PDRB per kapita berdasarkan tahun dasar 2000) mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 4,72 juta per tahun pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 5,35 juta per tahun pada tahun 2005. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduk Jawa Barat yang besarnya mencapai Rp. 5,69 juta di tahun 2002 dan Rp. 6,15 juta pada tahun 2005. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendapatan rata-rata masyarakat

Kota Tasikmalaya masih berada dibawah pendapatan rata-rata masyarakat Jawa Barat.

- b. Perekonomian Kota Tasikmalaya sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 didorong oleh 4 sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi rata-rata sebesar 29,9%, sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,73%, sektor jasa-jasa pemerintahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,04%, dan sektor pertanian dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,5%. Keempat sektor tersebut menyerap tenaga kerja hampir 82% dari total tenaga kerja yang ada di Kota Tasikmalaya.
- c. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 Pertumbuhan ekonomi (berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2000) tercatat sebesar 3,75%, sedangkan di tahun 2004 mencapai angka 4,99%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan adanya peningkatan investasi baik dari sisi pemerintah (berupa kenaikan belanja modal pemerintah daerah), maupun dari sisi swasta (berupa peningkatan kredit dan investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri). Namun demikian, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami penurunan cukup besar menjadi hanya sebesar 4,02%. Kondisi ini disebabkan karena melemahnya pertumbuhan pada dua sektor utama penggerak PDRB Kota Tasikmalaya, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- d. Dari keempat sektor penggerak pertumbuhan ekonomi, kecuali sektor industri pengolahan, semuanya memiliki kecenderungan mengalami penurunan *share* dalam perekonomian. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius bagi perencanaan perekonomian jangka panjang.
- e. Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya hingga saat ini belum bisa mengatasi penurunan tingkat pengangguran yang ada, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya masih berada di atas 10%, bahkan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 (tingkat pengangguran terbuka tahun 2005 tercatat sebesar 14,33% dibandingkan dengan 12,67% di tahun 2004).
- f. Meskipun sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan baik dalam produksi maupun *share*-nya pada perekonomian, daya saing sektor ini (yang diukur dengan metode LQ) relatif rendah dibandingkan dengan sektor

yang sama di Jawa Barat. Meskipun demikian daya saing sektor industri pengolahan relatif tinggi pada tingkat regional (Priangan Timur). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses pemasaran produk-produk industri pengolahan di Kota Tasikmalaya.

- g. Sektor industri pengolahan di Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh industri mikro dan kecil. Dari 3.029 total industri yang ada pada tahun 2004 tercatat sebanyak 1.174 industri mikro, 1.523 industri kecil, 326 industri menengah, dan 6 industri besar. Permasalahan industri mikro di Kota Tasikmalaya (berdasarkan hasil regresi *cross section* tahun 2004) adalah bahwa pengaruh rasio modal kerja per pekerja yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas output industri mikro. Tambahan mesin dalam industri mikro tidak mempengaruhi besarnya produktivitas output. Kondisi ini juga terjadi pada industri menengah dan besar. Akan tetapi untuk industri kecil bertambahnya rasio mesin per pekerja dan rasio modal kerja per pekerja akan mempengaruhi besarnya produktivitas output di industri kecil.
- h. Sektor perdagangan di Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh perdagangan kecil. Data sektor perdagangan tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah pedagang kecil mencapai angka sebesar 8.231 buah, pedagang menengah sebesar 57 buah, pedagang besar 9 buah. Pedagang kecil memiliki skala pelayanan lokal dan biasanya terkait langsung dengan pusat kegiatan produksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa skala pemasaran sektor perdagangan, seperti juga sektor industri pengolahan, di Kota Tasikmalaya masih terbatas. Keterbatasan sektor perdagangan juga ditunjukkan oleh masih sedikitnya jumlah pasar yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya, yang hingga tahun 2003 hanya memiliki 6 buah pasar modern dan 7 buah pasar tradisional.
- i. Kebutuhan anggaran pemerintah yang semakin besar menyebabkan semakin besarnya defisit anggaran belanja pemerintah (dari surplus sebesar 22,8 milyar pada tahun 2003 menjadi defisit sebesar 26 milyar di tahun 2005). Kondisi ini disebabkan karena besarnya laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah. Perbandingan laju pertumbuhan belanja pemerintah dengan laju pendapatan daerah tahun 2004 menunjukkan angka 13,78% berbanding 0,05%, sedangkan untuk tahun 2005 perbandingannya sebesar 12,46% berbanding 8,79%. Rendahnya kecepatan pendapatan daerah disebabkan karena menurunnya laju pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan dari masing-masing sebesar 15,1% dan 10,46% pada tahun

2004 menjadi hanya sebesar 8,86% dan 3,85% di tahun 2005. Melemahnya laju pertumbuhan pendapatan pajak daerah membutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai potensi pajak daerah di Kota Tasikmalaya.

4. Sosial Budaya dan Politik

Pada saat ini kondisi sosial budaya dan politik tergambarkan sangat sehat terbukti dengan kuatnya struktur masyarakat yang berlandaskan kepada agama Islam (98,43%). Kehidupan sosial yang berlandaskan keislaman ini menjadikan adanya toleransi dan kuatnya asas gotong royong dan kekeluargaan. Struktur masyarakat dengan latar belakang asli Sunda Priangan menyebabkan kerukunan antar beragama terjamin sehingga Kota Tasikmalaya terkenal juga sebagai kota santri.

Budaya sunda priangan ini pula yang membuat masyarakat menjadi sehat untuk memajukannya. Baik pendidikan formal ataupun nonformal mendorong pelestarian dan pengembangan budaya sunda ini dalam setiap aktivitas masyarakatnya. Hal ini dapat menjadi pendorong dan faktor yang membantu keselarasan pembangunan daerah sehingga lebih mudah karena mempunyai kesamaan visi dan misi.

Di bidang Politik Kota Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun tingkat partisipasi masyarakat yaitu sekitar 70% dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. Hal tersebut menunjukan tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dan proses politik. Demikian pula halnya dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2004 sebagaimana tergambarkan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4.
Perolehan Suara Partai Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2004
Daerah Pemilihan I, II, III dan IV

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Daerah Pemilihan				Total
		I	II	III	IV	
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhenisme)	494	96	218	0	808
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO)	244	0	0	307	551
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	3823	5997	4553	3330	17703
4	Partai Merdeka	108	1088	490	1629	3315
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7579	15620	19886	23371	66456
6	Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan (Partai PDK)	174	286	122	230	812
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	0	432	0	0	432
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	163	142	117	36	458
9	Partai Demokrat	6139	3962	3327	2523	15951
10	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	1243	1406	1466	643	4758
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Partai PDI)	439	0	684	0	1123
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNUI)	0	507	0	2267	2774
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	11970	11138	11015	7540	41663
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	549	291	858	306	2004
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4552	4391	5182	11696	25821
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7149	8779	0	6483	22411
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1933	5374	5634	4778	17719
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	10826	9199	9369	5467	34861
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	2336	0	0	0	2336
20	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	13288	16374	13740	12157	55559
21	Partai Patriot Pancasila	41	32	48	26	147
22	Partai Serikat Indonesia (PSI)	0	0	595	0	595
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	48	0	0	0	48
24	Partai Pelopor	346	881	46	0	1273
		73444	85995	77350	82789	319578

Sumber : Kantor Kesbang dan Linmas Kota Tasikmalaya

5. Prasarana dan sarana

- a. Kondisi prasarana jalan lebih terpusat ke arah pusat kota (Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Cipedes). Rasio panjang jalan per luas wilayah di tiap kecamatan masih sangat timpang, dengan perbedaan rasio tertinggi dan terendah mencapai lebih dari 3 kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat terkonsentrasi pada Kecamatan Tawang dan Cihideung yang berpotensi menimbulkan kemacetan yang semakin parah di pusat kota.
- b. Jumlah ruas jalan di Kota Tasikmalaya yang rusak dan rusak berat maiz cukup banyak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004, dari total panjang jalan 681,8 km, maka 41,5% diantaranya dalam keadaan rusak dan rusak berat. Pada tahun 2005 Kondisi tersebut semakin buruk, dimana dari seluruh panjang ruas jalan yang ada, 51,6% diantaranya dalam keadaan rusak dan rusak berat. Sebagian besar jalan yang rusak tersebut berstatus jalan desa dan lingkungan, 16,17% diantaranya berstatus jalan kota dan 10,58% berstatus jalan Provinsi. Hal tersebut tentu saja akan mengganggu aktivitas pergerakan baik orang maupun barang, paling tidak akan menimbulkan kenaikan biaya transportasi yang pada akhirnya akan mengurangi daya saing daerah.
- c. Luas area perumahan di Kota Tasikmalaya hingga tahun 2005 mencapai angka 23,02% atau seluas 3.950 Ha. Kondisi ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3.889 Ha (terjadi kenaikan sebesar 1,56%). Kecenderungan perkembangan perumahan terjadi ke arah utara kota. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan antara wilayah utara dengan selatan kota.
- d. Rendahnya prasarana air kotor/drainase di Kota Tasikmalaya ditunjukkan oleh angka rasio panjang saluran drainase terhadap panjang jalan yang hanya mencapai angka 36,22% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak jalan di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki saluran air kotor/drainase (terutama untuk jalan yang terkategori dalam jalan desa dan lingkungan). Hal ini menimbulkan potensi kerusakan jalan yang semakin besar karena dengan kondisi iklim basah yang dimiliki Kota Tasikmalaya, dimana bulan basahnya cukup panjang maka air hujan akan menggenangi jalan sehingga berpotensi dalam memperbesar rasio jumlah jalan yang rusak di Kota Tasikmalaya. Selain itu juga buruknya kondisi sistem drainase akan menyebabkan terjadinya potensi bencana banjir.

- e. Besarnya selisih antara rasio jumlah penduduk yang terjangkau prasarana sistem perpipaan air bersih dengan jumlah penduduk yang terlayani menunjukkan bahwa hingga saat ini penduduk masih memiliki alternatif lain dalam penyediaan air bersih untuk kehidupannya. Data yang ada tahun 2005 menunjukkan bahwa baru 20,22% masyarakat yang menggunakan sistem jaringan air bersih perkotaan. Tersedianya sumur dan pompa air di rumah menyebabkan penduduk lebih memilih menyediakan air bersih secara mandiri. Unit pelayanan air bersih Kawalu merupakan unit PDAM yang paling besar selisih rasio antara jumlah penduduk terjangkau dengan jumlah penduduk yang terlayannya (meskipun dari data yang lain jumlah KK yang tidak memiliki akses terhadap air bersihnya hanya 38,9%). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat preferensi masyarakat terhadap air bersih cenderung tidak melalui sistem perpipaan. Persentase terbesar dari KK yang tidak memiliki akses terhadap air bersih terjadi di Kecamatan Tamansari (51,35%), Kecamatan Cibeureum (45,87%) dan Kecamatan Indihiang (40,73%), selain itu ketiga kecamatan ini juga merupakan kecamatan yang memiliki persentase jumlah KK tanpa jamban yang paling besar, masing-masing sebesar 76,17% dan 61,8% serta 50,83%. Dengan kapasitas PDAM tahun 2005 sebesar 7.469.360 m³ per tahun, jumlah penduduk yang terlayani oleh sistem perpipaan mencapai 23,69%.
- f. Keterbatasan kapasitas TPA di daerah Ciangir serta masih kurangnya prasarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya, menyebabkan masyarakat mengolah sampahnya secara individu. Kondisi ini menimbulkan permasalahan pada lingkungan akibat tidak terpenuhinya standar pengolahan sampah ditingkat masyarakat. Jika digunakan standar bahwa setiap individu akan mengeluarkan sampah 2,4 L/hari, maka jumlah timbunan sampah sehari mencapai angka 1.459,8 m³ ditahun 2005, kondisi ini sangat tidak sebanding dengan prasarana pengangkutan sampah yang ada yang terdiri atas 11 *dump truck*, 3 *pick up* dan 3 *arm roll truck*.
- g. Aktivitas perdagangan sebagai jantung perekonomian Kota Tasikmalaya menimbulkan eksternalitas yang kurang baik bagi masyarakat (kondisi ini terutama terjadi di pusat kota). Kurang teraturnya penataan kawasan perdagangan di kawasan pusat kota menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan perdagangan, selain itu aktivitas ini juga mengambil hak para pejalan kaki untuk mendapatkan fasilitas yang memadai, dan menimbulkan kesan semrawut di pusat kota.

6. Pemerintahan

Terbentuknya Kota Tasikmalaya akan memberikan konsekuensi bahwa pelayanan publik harus lebih mendekati kepada kebutuhan masyarakat. Jumlah aparat dan SKPD diharapkan mampu melayani cakupan penduduk.

Struktur pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi bekal yang baik bagi terciptanya suasana dan daya dukung pembangunan sehingga sendi-sendi kehidupan bermasyarakat menjadi lebih maju dan dinamis.

B. TANTANGAN

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Kerusakan yang parah pada sebagian besar dari situ yang ada berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bahaya banjir. Selain itu banjir sesaat (sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi di saat bulan basah) juga terjadi di beberapa ruas jalan, terutama di sekitar pusat kota. Sekurang-kurangnya terdapat 25 titik banjir yang harus diwaspadai karena bisa menimbulkan gangguan dan berpotensi merugikan aktivitas kegiatan masyarakat.
- 2) Adanya bahaya dari gunung api yang masih aktif (meskipun berada di luar wilayah administrasi kota) memerlukan antisipasi yang lebih baik dalam proses perencanaan kota di masa yang akan datang.
- 3) Beberapa lokasi di Kota Tasikmalaya teridentifikasi sebagai daerah zona gerakan tanah yang tinggi, khususnya di daerah yang berada di sepanjang aliran sungai, yaitu di wilayah bagian Timur dan Utara kota, serta daerah sekitar aliran Sungai Ciwulan dan Citanduy.
- 4) Permasalahan koordinasi penataan ruang di sekitar Wilayah Priangan Timur mengancam keterpaduan ruang sebagai akibat adanya *perbedaan kepentingan* dari daerah lain di sekitar Kota Tasikmalaya.
- 5) Kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan alam sebagai akibat berubahnya pola bulan basah dan kering, polusi udara akibat kemacetan, polusi air akibat sistem drainase yang kurang baik, masalah persampahan, dan penurunan daya dukung alam, serta berbagai permasalahan lain yang terkait dengan *space of life* menjadi isu strategis untuk dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan.

b Proyeksi Permasalahan

- 1) Makin meningkatnya aktivitas perkotaan menimbulkan potensi pencemaran udara, khususnya CO dan debu. Hasil pengukuran kualitas udara pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kadar CO dan debu, khususnya di kawasan pusat kota, berada pada tingkat sedang.
- 2) Berdasarkan data aliran drainase kota menunjukkan bahwa kondisi aliran air di Kota Tasikmalaya masih berada pada tahapan yang rendah (rasio antara panjang drainase dengan panjang jalan sebesar 36,22%). Masih banyak jalan Kota Tasikmalaya belum memiliki sistem drainase yang baik, sehingga berpotensi untuk menimbulkan genangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
- 3) Lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam dapat dilihat dari belum terbentuknya statistik sumber daya alam dan lingkungan, sehingga berbagai potensi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam belum dapat diantisipasi dengan baik.
- 4) Meningkatnya suhu kota akhir-akhir ini salah satunya disebabkan karena kurangnya penanganan dan perbaikan dalam menata vegetasi yang ada di sekitar kota, khususnya vegetasi yang berada di sepanjang jalan utama. Hingga saat ini jenis vegetasi yang ada hanya berasal dari jenis tanaman hias/kebun dan sedikit tanaman pelindung.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Karakteristik kondisi alam yang berkelembaban dan bertemperatur sedang, pemandangan yang cukup baik, serta tingkat polusi yang masih rendah memungkinkan Kota Tasikmalaya untuk menjadi salah satu kota yang akan berhasil dalam mengendalikan kualitas lingkungannya.
- 2) Upaya pemerintah yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup akan meningkatkan kenyamanan dan kualitas kehidupan di Kota Tasikmalaya, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 3) Tersedianya berbagai fasilitas kota yang ramah lingkungan serta sistem pengelolaan lingkungan yang baik akan semakin meningkatkan daya tarik kota sehingga bisa meningkatkan kemajuan dan modernisasi kota.

d. Hasil Analisis

- 1) Jumlah penduduk yang semakin bertambah akan meningkatkan kepadatan penduduk, pergerakan lalu lintas kendaraan, barang dan orang. Pada akhirnya kondisi tersebut akan menekan kualitas lingkungan, seperti adanya pencemaran udara dan air serta berpengaruh kepada produktivitas tanah.
- 2) Pergeseran tata ruang kota sebagai akibat adanya pertambahan penduduk memerlukan pengelolaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang semakin baik. Oleh sebab itu diperlukan suatu sarana yang bisa mengontrol pengelolaan SDA dan daya dukung lingkungan agar proses pembangunan bisa dilakukan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan antisipasi dalam rangka terjadinya perubahan cuaca dan suhu secara global yang berdampak pada perubahan suhu, musim, cuaca dan perubahan lingkungan.
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada.
- 5) Mewujudkan koordinasi yang lebih baik dengan daerah sekitar dalam rangka menciptakan struktur tata ruang tanpa mengurangi tujuan pembangunan yang ada di masing-masing daerah.

2. Demografi

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Ketimpangan densitas penduduk antar wilayah kecamatan yang pada akhirnya dapat memicu ketimpangan pendapatan.
- 2) Mobilitas penduduk yang rendah karena aksesibilitas prasarana dan sarana transportasi yang timpang dan tidak memperhatikan aspek kependudukan.
- 3) Jumlah pekerja perempuan yang terus mengalami penurunan.

Angka-angka jumlah angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan jumlah usia kerja berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2004 dan tahun 2005 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2.5.
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tasikmalaya Tahun 2004

Kegiatan Utama		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Angkatan Kerja	Bekerja	154.260	69.612	223.872
	Mencari Kerja	14.120	18.366	32.486
Jumlah Angkatan Kerja		168.380	87.978	256.358
Bukan Angkatan Kerja		59.924	156.656	216.580
Jumlah Usia Kerja		228.304	244.634	472.938

*) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)
Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2004

Tabel 2.6.
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tasikmalaya Tahun 2005

Kegiatan Utama		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Angkatan Kerja	Bekerja	154.716	68.518	223.234
	Mencari Kerja*)	17.186	20.166	37.352
Jumlah Angkatan Kerja		171.902	88.684	260.586
Bukan Angkatan Kerja		66.344	167.264	233.608
Jumlah Usia Kerja		238.246	255.948	494.194

*) Mencari kerja secara aktif (mencari kerja, dan mempersiapkan usaha)
Sumber : Bapeda dan BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda 2005

b. Proyeksi Permasalahan

- 1) Ketimpangan densitas penduduk menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang optimal.
- 2) Rawannya aktivitas ekonomi kota karena migrasi-masuk dapat memicu hal-hal yang negatif.
- 3) Administrasi kependudukan yang masih belum sesuai harapan.
- 4) Ketimpangan jender terhadap akses akan pendidikan yang lebih tinggi dan lapangan pekerjaan.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk natural.
- 2) Terkendalinya migrasi-masuk.
- 3) Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang handal.
- 4) Terwujudnya pemetaan dan pengurangan ketimpangan densitas penduduk.

- 5) Terciptanya daerah yang menjadi tarikan pembangunan sehingga meminimalkan ketimpangan yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

d. Hasil Analisis

- 1) Terwujudnya sistem administrasi kependudukan sehingga teridentifikasi bagaimana penduduk dan densitas berkembang yang nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kedepan.
- 2) Struktur penduduk yang mengarah kepada usia produktif yang mendukung pembangunan daerah dengan tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat dicapai dengan asumsi pengendalian pertumbuhan penduduk terkendali di sekitar 1 %.
- 3) Aspek kependudukan yang mengarah kepada kualitas pembangunan manusia yang lebih baik sehingga mendukung IPM Jawa Barat sekitar 80.
- 4) Penduduk yang mempunyai produktivitas lebih tinggi, dengan karakteristik penduduk yang lebih sehat, lebih berpendidikan dan penduduk yang mampu secara pendapatan.
- 5) Migrasi-masuk yang terkendali.
- 6) Pembangunan kawasan selatan Kota Tasikmalaya.
- 7) Mengurangi Ketimpangan Jender dalam proses pembangunan (*selaras dengan Millenium Development Goals*).

3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Posisi daya saing ekonomi yang masih rendah saat ini (terutama untuk wilayah yang lebih luas) dapat menjadi ancaman bagi perkembangan perekonomian kota jika aktivitas kegiatan ekonomi tidak mampu untuk memperluas pemasaran hasil produksinya.
- 2) Pemerintah daerah harus berupaya untuk menanggulangi masalah pengangguran yang cenderung terus meningkat. Selain itu tingginya tingkat inflasi (sebagai akibat dari adanya kebijakan eksternal, terutama dari pemerintah pusat dalam bentuk kenaikan BBM dan Elpiji) akan membawa pengaruh buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam jangka pendek hingga menengah pemerintah daerah perlu mengantisipasi kedua kecenderungan tersebut secara lebih hati-hati.
- 3) Meningkatnya kebutuhan akan pengeluaran pemerintah Daerah harus diantisipasi dengan cara mencari alternatif potensi sumber pendapatan

yang lebih besar tanpa mengganggu aktivitas kegiatan perekonomian (tidak menimbulkan *crowding out effect*) agar defisit anggaran pemerintah daerah tidak terus membesar.

b. Proyeksi Permasalahan

- 1) Sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya (sektor industri dan perdagangan) masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil, serta sektor informal (karena masih belum berbadan hukum). Pengembangan kegiatan ini kurang didukung dengan regulasi yang memberi ruang untuk berkembangnya usaha sektor informal.
- 2) Permasalahan kurangnya akses pemasaran dan rendahnya daya saing hasil produksi merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan alternatif penyelesaiannya.
- 3) Peningkatan pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan Sumber Daya Alam. Hal tersebut menyebabkan krisis SDA, khususnya krisis air, daya dukung lahan dan energi yang berdampak pada perekonomian daerah.
- 4) Upaya-upaya perencanaan yang lebih serius perlu dilakukan guna menciptakan kestabilan perekonomian (khususnya pertumbuhan ekonomi) dalam jangka panjang.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Keberhasilan kondisi perekonomian Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 akan sangat ditentukan oleh tingkat laju pertumbuhan pendapatan per kapita (berupa pengurangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk) yang lebih besar daripada laju pertumbuhan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu laju pertumbuhan pendapatan perkapita 5 – 6% per tahun akan menjamin keberlanjutan pembangunan di Kota Tasikmalaya.
- 2) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan makro regional adalah memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan Kota Tasikmalaya akan tercapai jika tingkat pengangguran terbuka mendekati tingkat pengangguran alamiahnya. Angka laju kesempatan kerja yang hampir sama dengan laju pertumbuhan penduduk merupakan sasaran jangka panjang yang harus terus dicapai oleh pemerintah daerah.

- 3) Membaiknya iklim usaha baik industri kecil, menengah dan besar. Hal ini ditandai dengan terjadinya mobilisasi vertikal dan horisontal antara aktivitas kegiatan usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah dan besar, serta mendorong aktivitas koperasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
- 4) Menjaga agar produktivitas modal (ICOR) tetap berada pada angka sekitar 3 – 4, serta mendorong peningkatan investasi (baik yang berasal dari swasta maupun pemerintah).
- 5) Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- 6) Terbangunnya sistem, kelembagaan, dan infrastruktur perekonomian yang maju dan unggul.
- 7) Terwujudnya prinsip demokrasi ekonomi untuk menjamin adanya kebebasan ekonomi yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan.

d. Hasil Analisis

- 1) Terwujudnya daerah penunjang pertumbuhan bagi pemerataan pembangunan Kota Tasikmalaya.
- 2) Terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan pada skala regional yang didukung oleh kestabilan ekonomi yang mantap dan daya saing yang tinggi.
- 3) Menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan terus berupaya meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang melebihi laju pertumbuhan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat.
- 4) Terciptanya pembangunan yang serasi antara potensi perekonomian kota, pertumbuhan penduduk, daya dukung kota dan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Pelaksanaan pembangunan harus serasi dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kabupaten/kota lain di sekitarnya.
- 6) Terciptanya tingkat pelayanan yang semakin baik dan efisien untuk mendukung aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat.
- 7) Terwujudnya Kota Agropolitan.
- 8) Terciptanya kesempatan berusaha secara adil dan sehat.

4. Sosial Budaya dan Politik

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Struktur penduduk yang bertumpu pada usia remaja dan dewasa juga menimbulkan potensi kerawanan sosial apabila tidak diantisipasi secara baik dengan menyediakan wadah penyaluran aspirasi serta bila tidak dipeliharanya iklim sosial dan politik yang kondusif.
- 2) Kenakalan remaja sebagai akibat dari kurangnya prasarana dan sarana yang menunjang aktivitas sosial dan politik di Kota Tasikmalaya.

b. Proyeksi permasalahan

- 1) Pada masa yang akan datang Kota Tasikmalaya berpotensi menjadi tujuan migrasi-masuk sehingga dapat memicu berbagai bentuk kerawanan sosial.
- 2) Mulai terkikisnya kelestarian budaya sunda priangan karena belum adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah sehingga terkesan budaya sunda hanya dipelihara atas inisiatif dan peran masyarakat saja .
- 3) Kurangnya komunikasi publik untuk mempertahankan budaya sunda priangan.
- 4) Kurangnya lembaga-lembaga pendidikan yang modern dan berwawasan internasional sehingga dapat menyebabkan lambannya perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan.
- 5) Sistem politik nasional yang kurang kondusif dapat berdampak pula terhadap kondisi politik di Kota Tasikmalaya.
- 6) Kurangnya dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim sosial politik yang kondusif.
- 7) Partisipasi dan aspirasi pemuda di Kota Tasikmalaya kurang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana publik yang memadai.
- 8) Kurangnya pendataan yang ada terkait dengan peningkatan dan pengembangan sosial budaya di Kota Tasikmalaya.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- 2) Meningkatnya jumlah anggota aktif dari partai politik yang ada.
- 3) Berkembangnya prasarana dan sarana pengembangan dan pelaku budaya yang mengakar pada budaya sunda priangan.

- 4) Iklim sosial dan politik yang sehat dan kondusif karena didukung oleh struktur masyarakat yang memegang teguh nilai agama dan moral.

d. Hasil Analisis

- 1) Terlembagakannya kembali budaya sunda priangan sebagai bagian dari budaya nasional.
- 2) Terpeliharanya kerukunan umat beragama.
- 3) Terciptanya ormas dan institusi kepemudaan sehingga menciptakan masyarakat mandiri yang demokratis dan agamis.
- 4) Terbentuknya Peraturan Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai hidup di Kota Tasikmalaya.
- 5) Terciptanya iklim politik yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai demokratis yang sehat dan bertanggung jawab sehingga mampu menunjang pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya.
- 6) Terpeliharanya nilai-nilai luhur Islam dan kesantunan di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.

5. Prasarana dan Sarana

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap lahan permukiman. Perkembangan permukiman cenderung diarahkan untuk memadati wilayah-wilayah utara kota, sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah utara dan selatan kota. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah kota agar pembangunan kota di masa yang akan datang tidak menimbulkan disparitas antara wilayah utara dan selatan. Selain itu bertambahnya permukiman berakibat pada meningkatnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan tambahan berbagai prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Potensi bencana alam sebagai akibat dari aktivitas gunung berapi yang masih aktif dan pergerakan tanah yang cukup tinggi di berbagai wilayah Kota Tasikmalaya dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan selama ini.

- 3) Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan dapat memicu terjadinya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di perkotaan.
- 4) Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas kegiatan masyarakat memerlukan perencanaan yang komprehensif. Dengan kondisi prasarana sampah yang ada saat ini maka kapasitas maksimum penampungan TPA akan terus mengalami pemendekan usia. Oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan kapasitas prasarana dan pengelolaan sampah dengan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- 5) Adanya jalan lintas Rajapolah-Ciamis akan menyebabkan Kota Tasikmalaya relatif terisolir, kondisi ini dapat menjadi penghambat perkembangan kota pada masa yang akan datang.

b. Proyeksi Permasalahan

- 1) Kondisi kerusakan jalan menjadi salah satu hambatan bagi perkembangan aktivitas kegiatan produktif yang ada di kawasan perkotaan, karena akan menghambat aksesibilitas dan menimbulkan tambahan biaya produksi sebagai akibat kerusakan kendaraan. Kemacetan jalan, kurangnya prasarana perpustakaan juga menjadi salah satu masalah utama dalam perencanaan tata ruang di kawasan perkotaan.
- 2) Ancaman terjadinya perluasan wilayah banjir di wilayah perkotaan sebagai akibat buruknya sistem drainase yang ada. Potensi ini semakin besar karena sebagian besar dari situ yang ada di Kota Tasikmalaya berada pada kondisi rusak, sehingga mengganggu sistem aliran air permukaan.
- 3) Sistem pembuangan air kotor yang belum baik dapat mengganggu kondisi sanitasi lingkungan, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit menular yang pada akhirnya akan berakibat pada menurunnya angka indeks kesehatan Kota Tasikmalaya.
- 4) Kecenderungan masyarakat yang masih memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri (disertai dengan jumlah penduduk yang terus bertambah) akan membawa dampak bagi kesehatan sejalan dengan buruknya sistem drainase dan pembuangan air kotor di Kota Tasikmalaya.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Terpenuhinya prasarana pendidikan dan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa menjadi modal dasar dalam menghasilkan penduduk yang berkualitas dalam hingga tahun 2025.

- 2) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
- 3) Tersedianya prasarana yang mendukung aktivitas sektor pariwisata, sehingga diharapkan Kota Tasikmalaya bisa menjadi salah satu kota tujuan wisata di Jawa Barat.
- 4) Terciptanya prasarana yang mencukupi serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar keberlanjutan pembangunan kota bisa terus ditingkatkan tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan.
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana publik yang semakin merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

d. Hasil Analisis

- 1) Prasarana transportasi akan menjadi faktor pendukung yang sangat vital sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, untuk mendukung penduduk sebesar kurang lebih 1 juta jiwa hingga tahun 2025 maka perlu dipikirkan sarana transportasi masal dan manajemen lalu lintas yang sesuai dengan karakteristik Kota Tasikmalaya.
- 2) Terciptanya prasarana pendukung aktivitas industri dan perdagangan yang mampu meningkatkan daya saing produk hasil industri dan perdagangan Kota Tasikmalaya.
- 3) Terwujudnya berbagai prasarana pendukung bagi aktivitas kegiatan sektor pariwisata.
- 4) Semakin tingginya tuntutan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan sosial, agar terwujud lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman.
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana dasar yang menopang kehidupan masyarakat.

6. Pemerintahan

a. Proyeksi Ancaman

- 1) Kurangnya prasarana dan sarana penunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan dan penciptaan ekonomi.
- 2) Kurangnya insentif bagi aparat pemerintah karena terbatasnya dana pengeluaran pemerintah akibat konsekuensi sebagai daerah muda usia.

b. Proyeksi Permasalahan

- 1) Masih kurang memadainya jumlah aparat untuk dapat memberikan layanan publik yang optimum.
- 2) Masih rendahnya kinerja tata kelola pemerintahan karena masih berada pada periode pembelajaran sebagai pemerintahan baru.
- 3) Kurangnya dana dan kemampuan keuangan daerah yang ada karena kecilnya cakupan wilayah dan penduduk yang berada dalam Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
- 4) Masih kurangnya sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.
- 5) Masih terbatasnya informasi dan data-data pemerintahan karena usia yang relatif muda.
- 6) Masih tumpang tindihnya infrastruktur yang dimiliki antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- 7) Belum tercipta sepenuhnya iklim "*good governance*" karena mekanisme akuntabilitas yang masih dalam proses pembelajaran terkait dengan usia pemerintah daerah yang masih muda.

c. Proyeksi Keberhasilan

- 1) Semakin berkembangnya kemampuan tata kelola pemerintahan seiring dengan perkembangan masyarakat daerah Kota Tasikmalaya
- 2) Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat yang mendukung pembangunan daerah yang sinergis.
- 3) Terbentuknya organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan mengembangkan konsep "*learning by doing*" dalam usia pemerintahan Kota Tasikmalaya yang relatif masih muda.

d. Hasil Analisis

- 1) Terciptanya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat menunjang pelayanan publik dan agen pembangunan daerah untuk Kota Tasikmalaya.
- 2) Terciptanya pemerintahan yang berlandaskan kepada "*good governance*" karena terbentuk berdasarkan kepada kepercayaan dari semua elemen masyarakat.
- 3) Terciptanya kemandirian pemerintahan yang dapat mendukung percepatan dan keberhasilan pembangunan daerah karena didukung kerja sama dan saling pengertian antara eksekutif dengan legislatif.

- 4) Terciptanya sistem informasi kota terpadu antar SKPD.
- 5) Terciptanya pemimpin yang cerdas, jujur dan disegani.

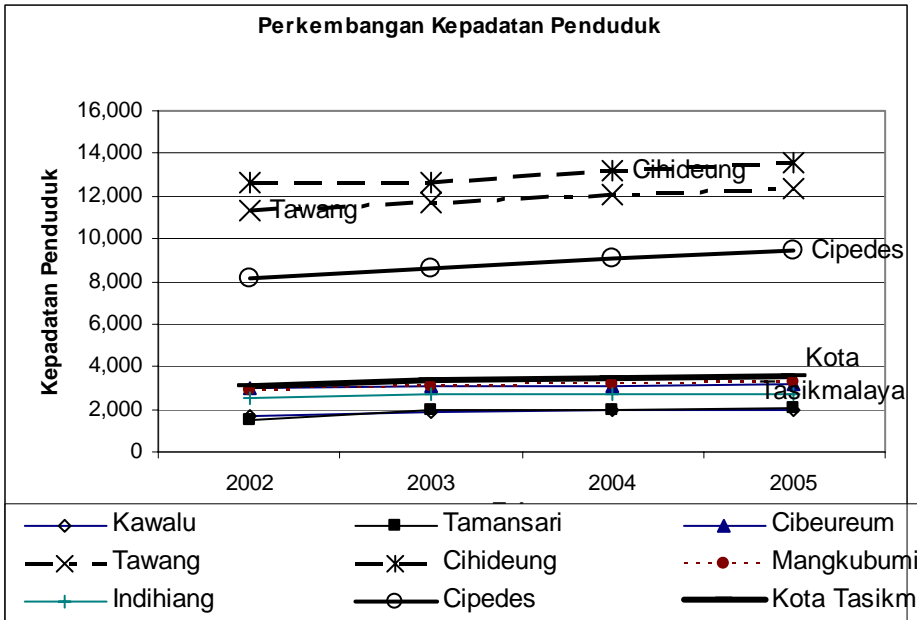
C. MODAL DASAR

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Capaian Keberhasilan

- 1) Terciptanya program-program (yang sebagian sudah mulai direalisasikan) yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis baik di tingkat kota maupun di tingkat kawasan khusus sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Tasikmalaya.
- 2) Manajemen lalu lintas yang lebih baik, sehingga mencegah timbulnya kemacetan baik di dalam kota maupun antar kota serta tingkat polusi di Kota Tasikmalaya yang relatif rendah.
- 3) Relatif stabilnya luas area non budidaya (hutan) dalam kisaran 16,8% atau seluas 2.885,11 Ha sebagai alat untuk mencegah polusi dan daerah tangkapan air.
- 4) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, yang ditunjukkan dengan peningkatan kepadatan penduduk yang relatif stabil di tahun 2004-2005 di tiap Kecamatan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. dibawah ini

Gambar 2.5.
Tren Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan
di Kota Tasikmalaya



b. Peluang

- 1) Berdasarkan rencana tata ruang (baik tingkat nasional, provinsi, dan kota), maka Kota Tasikmalaya memiliki fungsi yang strategis sebagai pusat pengembangan wilayah di sekitar Priangan Timur. Posisi kota yang strategis karena aksesibilitas yang baik di jalur selatan Pulau Jawa, serta kelengkapan prasarana dan sarana yang ada diharapkan Kota Tasikmalaya dapat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan wilayah di sekitar Priangan Timur.
- 2) Kondisi alam (seperti adanya beberapa situ, pemandangan alam wilayah perbukitan), iklim yang baik, keberadaan fasilitas perhotelan yang mencukupi, serta aktivitas perdagangan dan industri yang unik memungkinkan Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota tujuan pariwisata di Jawa Barat.
- 3) Ketersediaan lahan yang mencukupi serta karakteristik lahan yang sesuai dengan persyaratan aktivitas kegiatan ekonomi, memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang ada untuk kegiatan pengembangan kota di masa yang akan datang.

2. Demografi

a. Capaian Keberhasilan

- 1) Tersedianya fasilitas layanan masyarakat terutama Rumah Sakit Umum yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk.
- 2) Masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan angka kelahiran hidup dan kesehatan balita, banyaknya jumlah posyandu serta tersedianya tenaga medis sampai di tingkat puskesmas.
- 3) Makin tingginya pasangan usia subur yang mengikuti program KB untuk mendukung kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk
- 4) Rasio pekerja laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang.
- 5) Semakin baiknya kebijakan administrasi kependudukan sebagai modal dasar untuk pendataan, antisipasi dan pengendalian migrasi-masuk di Kota Tasikmalaya.

b. Peluang

- 1) Potensi pertumbuhan penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang terdapat pada Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes sebagai kota urban dan kecamatan-kecamatan lainnya sebagai sub-urban.
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali.
- 3) Berkembangnya pelayanan-pelayanan kesehatan sebagai pendukung pengendalian pertumbuhan penduduk yang masih terus meningkat.
- 4) Pada Kelompok penduduk yang berpendidikan tinggi telah terjadi kesetaraan jender dan mampu memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini baik guna mendorong pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan ditinjau dari aspek tenaga kerja.

3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Capaian Keberhasilan

- 1) Perkembangan perekonomian yang terjadi di Kota Tasikmalaya telah membawa perbaikan pada kondisi investasi (baik berupa investasi swasta maupun pemerintah). Tercatat terjadi peningkatan yang cukup drastis dari total investasi di Kota Tasikmalaya. Rata-rata laju pertumbuhan investasi mencapai angka 61,83% dari sebesar Rp. 325,6 Milyar pada tahun 2002 menjadi Rp. 1.379,9 Milyar pada tahun 2005, dimana laju pertumbuhan

rata-rata investasi swasta mencapai angka 62,43% sedangkan laju pertumbuhan rata-rata investasi pemerintah sebesar 51,98%. Bahkan sejak tahun 2004 di Kota Tasikmalaya sudah ada investor dalam negeri dan luar negeri yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi fasilitas (PMDN dan PMA).

- 2) Sumbangan terbesar investasi swasta terjadi dari peningkatan kredit. Posisi kredit yang disalurkan ke Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan dari hanya sebesar Rp. 305,7 Milyar pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 1.295,8 Milyar pada tahun 2005 atau meningkat lebih dari 4 kali lipatnya. Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan sejalan dengan semakin meningkatnya rasio antara jumlah tabungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah kredit yang diberikan, dari hanya sebesar 22,8% pada tahun 2003 menjadi sebesar 75,87% di tahun 2005. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pelarian tabungan dari Kota Tasikmalaya ke kota lainnya semakin kecil, atau dengan kata lain tingkat penyaluran dana masyarakat di Kota Tasikmalaya telah mengalami peningkatan yang cukup tajam.
- 3) Kota Tasikmalaya termasuk kedalam beberapa kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki ukuran *government size* (rasio antara belanja pemerintah terhadap PDRB) yang cukup besar. *Government size* Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan dari sebesar 7% pada tahun 2002 menjadi 11,56% di tahun 2005. Hubungan peningkatan *government size* yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan indeks korelasi sebesar 0,126 hal ini menggambarkan bahwa belanja pemerintah mampu mendorong tumbuhnya perekonomian di Kota Tasikmalaya (hal ini sesuai dengan *Wagner Law* dalam wacana literatur keuangan publik), kondisi ini sekaligus menggambarkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian di Kota Tasikmalaya, dan merupakan kejadian yang jarang terjadi di kota/kabupaten di Indonesia.
- 4) Keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi di Kota Tasikmalaya juga bisa diukur dengan indikator ICOR (*incremental capital output ratio*). Penurunan nilai ICOR di Kota Tasikmalaya dari sebesar 3,25 pada tahun 2004 menjadi sebesar 3,07 di tahun 2005 menunjukkan telah terjadinya peningkatan produktivitas modal yang ada di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menggambarkan tingkat efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan modal, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua modal yang

digunakan dalam proses pembangunan (baik itu yang berasal dari swasta maupun dari pemerintah) memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sesuai dengan hasil regresi dari sektor industri yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara modal kerja dengan peningkatan output di seluruh jenis industri yang ada di Kota Tasikmalaya, maupun di seluruh kecamatan yang ada. Besarnya nilai elastisitas modal kerja untuk tiap jenis industri adalah 0,89 untuk kategori industri mikro, sebesar 0,57 untuk kategori industri kecil, dan 0,76 untuk industri menengah dan besar. Sedangkan besarnya elastisitas modal kerja terhadap peningkatan output dari industri yang ada di tiap kecamatan adalah masing-masing 0,69 untuk Kecamatan Cibeureum, untuk Kecamatan Cihideung sebesar 0,59; sedangkan Kecamatan Cipedes memiliki nilai elastisitas sebesar 0,61; Kecamatan Indihiang sebesar 0,85; Kecamatan Kawalu sebesar 0,68; Kecamatan Mangkubumi sebesar 0,64; sedangkan Kecamatan Tawang dan Tamansari masing-masing sebesar 0,76 dan 0,81. Tanda positif dan lebih kecil dari satu pada semua nilai elastisitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan antara peningkatan modal kerja dengan peningkatan output akan tetapi besarnya tambahan output yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingkan dengan tambahan modal kerjanya (dalam literatur ekonomi ini dikenal dengan istilah besaran yang inelastis).

- 5) Dari hasil perhitungan nilai LQ sektor perdagangan di Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan memiliki daya saing yang cukup besar baik di tingkat wilayah Priangan Timur maupun di Provinsi Jawa Barat. Sektor perdagangan di Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai sektor basis, yaitu sektor yang memiliki kemampuan pasar di luar Kota Tasikmalaya.

b. Peluang

- 1) Meskipun hingga saat ini rata-rata pendapatan per kapita Kota Tasikmalaya masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Jawa Barat akan tetapi Kota Tasikmalaya memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Barat (dengan angka 6,85% berbanding 3,07%). Jika kondisi ini terus berlangsung maka akan terjadi konvergensi antara Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

pendapatan per kapita rata-rata Kota Tasikmalaya telah melebihi pendapatan per kapita rata-rata Provinsi Jawa Barat.

- 2) Dengan dilakukannya peningkatan teknologi budidaya tani diharapkan sektor pertanian Kota Tasikmalaya akan semakin berkembang. Ketersediaan lahan yang mencukupi dan produktivitas lahan yang tinggi (karena berada disekitar daerah aliran sungai dan kaki gunung Galunggung) juga akan menjadi pendorong pertumbuhan produksi sektor pertanian.
- 3) Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian, sektor perdagangan di Kota Tasikmalaya memiliki peluang untuk tumbuh kembali karena adanya faktor lingkungan masyarakat Tasikmalaya yang terkenal sebagai salah satu masyarakat pedagang yang cukup tangguh di Indonesia. Selain itu dengan dialokasikannya ruang bagi para pedagang akan dapat mendorong tumbuhnya sentra-sentra perdagangan baru di Kota Tasikmalaya yang akan menimbulkan *multiplier effect* yang cukup signifikan bagi kemajuan wilayah sekitarnya.
- 4) Adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan alokasi dana bagi kegiatan pembangunan, karena pengeluaran pemerintah daerah memiliki *multiplier effect* yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
- 5) Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap sektor industri di Kota Tasikmalaya didapatkan hasil bahwa penambahan rasio modal kerja per pekerja untuk seluruh aktivitas kegiatan industri diyakini akan mampu mendorong produktivitas output dari sektor industri. Dengan meningkatnya akses pemberian kredit dari sektor perbankan kepada para pengusaha (sesuai dengan tren yang terjadi hingga saat ini), serta tingkat produktivitas modal yang baik, sektor ini diharapkan akan menggantikan posisi sektor perdagangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kota.

4. Sosial Budaya dan Politik

a. Capaian Keberhasilan

- 1) Terpenuhinya sarana-sarana peribadatan dan sekolah agama yang dapat mendukung iklim dan suasana masyarakat yang agamis dan taat hukum.

- 2) Kondisi-kondisi sentra budaya yang masih terpelihara seperti kesenian Rudat, Kuda lumping, Padalangan dan Qasidah yang merupakan khasanah pengikat budaya bagi masyarakat Kota Tasikmalaya
- 3) Terdapatnya wadah-wadah untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dimana hampir 100% partai politik yang ada memiliki perwakilan DPC di Kota Tasikmalaya dengan jumlah partisipasi aktif dari anggota-anggotanya.
- 4) Kondisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan yang terus berkembang yang beraneka ragam aktivitas yang turut membantu dalam penciptaan iklim sosial dan budaya yang kondusif selama ini di Kota Tasikmalaya. Dengan berkembang dan meningkatnya LSM berarti pula meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berkreasi dan mengembangkan ide sebagai alat kontrol guna terwujudnya “*good governance*”.

b. Peluang

- 1) Terbukanya iklim sosial budaya pada masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga pada masa depan perkembangan positif dari peremajaan dan kelestarian budaya priangan tetap terjaga.
- 2) Makin dinamisnya masyarakat Kota Tasikmalaya membuat demokrasi untuk kondisi sosial, budaya dan politik semakin terbuka lebar, dan ini membuat teraspirasinya lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang terus membesar dan mendorong iklim yang kondusif.
- 3) Terbukanya peluang bahwa pilkada yang akan datang akan tetap terselenggara dengan baik dan persaingan yang sehat karena masih didukung oleh struktur masyarakat islam yang kuat.
- 4) Makin subur dan teraspirasikannya organisasi-organisasi kepemudaan karena makin besarnya golongan penduduk berusia 15 sampai 35 tahun.

5. Prasarana dan Sarana

a. Capaian Keberhasilan

- 1) Terpenuhi dan terlayannya pelayanan sarana pendidikan di tiap kecamatan mulai dari tingkat pendidikan pra sekolah (TK) hingga sekolah dasar. Selain itu tersedianya pondok pesantren di tiap kecamatan mencirikan pola hidup masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis. Di bidang sarana kesehatan juga sudah memenuhi standar fasilitas

kesehatan, dimana untuk tiap kecamatan terdapat minimal satu buah puskesmas ditambah dengan beberapa puskesmas pembantu. Kondisi ini menggambarkan adanya akses masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan yang mencukupi. Bersamaan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, kedua indikator tersebut mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tasikmalaya dari 69,92 pada tahun 2002 menjadi sebesar 72,1 (jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 65,8 dan 69,9 pada periode yang sama).

- 2) Rasio elektrifikasi Kota Tasikmalaya untuk tingkat kelurahan telah mencapai angka 100% sejak tahun 2001, sehingga masyarakat kota mampu mendapatkan akses informasi secara cepat, serta mampu menjaga kapasitas produksi dari aktivitas kegiatan usaha yang mereka lakukan. Kondisi ini tentu saja mampu memberikan tingkat kepuasan yang mencukupi bagi masyarakat secara menyeluruh.
- 3) Fasilitas penginapan yang terus berkembang, jika dilihat dari jumlah kamar yang tersedia (bahkan hingga saat ini sudah terdapat hotel bintang 3), menyebabkan terjadinya peningkatan pada laju pertumbuhan tingkat kedatangan tamu dari hanya sebesar 2,2% pada tahun 2003 menjadi sebesar 9,47% pada tahun 2004. Hal ini setidaknya menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan pada daya tarik Kota Tasikmalaya bagi warga luar Kota Tasikmalaya, khususnya daya tarik dari sektor pariwisata.

b. Peluang

- 1) Kondisi prasarana pendidikan dan kesehatan yang cukup baik menjadi dasar keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan modal manusia yang lebih baik maka proses pembangunan bisa terus ditingkatkan. Kondisi ini terlihat dari angka peningkatan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, bahkan melebihi IPM Jawa Barat.
- 2) Dengan membaiknya tingkat elektrifikasi dan meningkatnya jumlah kapasitas listrik terpasang, memungkinkan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu pusat pengembangan industri mikro dan kecil yang cukup tangguh di kawasan regional. Kondisi ini juga didukung oleh tingkat investasi yang meningkat (dengan indikator utama jumlah kredit modal kerja yang diberikan oleh sektor perbankan).

- 3) Tersedianya penginapan, aktivitas perdagangan yang khas dan sumber daya alam yang mendukung memungkinkan berkembangnya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan menjadi pendorong pembangunan kota.
- 4) Dengan semakin baiknya prasarana industri dan perdagangan yang disediakan oleh pemerintah, akses yang baik bagi jalur transportasi antar wilayah, akan meningkatkan fungsi Kota Tasikmalaya sebagai kota pusat koleksi dan distribusi, bahkan tidak hanya sebatas Wilayah Priangan Timur saja.

6. Pemerintahan

a. Capaian keberhasilan

- 1) Sudah baiknya tata kelola pemerintahan secara relatif bila dikaitkan dengan usia pemerintahan yang masih muda.
- 2) Makin berkembangnya kapasitas dan kemampuan aparat pemerintah daerah dan juga kelembagaannya sehubungan dengan tingginya keinginan untuk maju dari sebuah pemerintahan yang berusia muda.
- 3) Adanya kecukupan dari rasio pelayanan publik antara jumlah aparat per jumlah penduduk sehingga menghasilkan pelayanan publik yang baik dan cepat.

b. Peluang

- 1) Masih terbukanya pembentukan-pembentukan SKPD baru yang terkait dengan suatu fungsi penyelenggaraan pemerintahan tertentu yang diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga pemerintah daerah.
- 2) Masih terbukanya peluang untuk perekrutan-perekrutan aparat yang berkualitas sehingga dapat mendukung dan mempercepat pembangunan daerah.
- 3) Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang baik antar SKPD yang ada sehingga mampu bersama-sama meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005- 2025

A. VISI

Visi Kota Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan kecenderungan kondisi yang ada hingga saat ini (baik masyarakat, maupun lingkungan alam dan buatan), pertimbangan akan proyeksi potensi, peluang, ancaman, hambatan dan keberhasilan dari masing-masing bidang hingga tahun 2025, serta memperhatikan berbagai keinginan dan aspirasi dari *stakeholder* dan pemerintah daerah. Selain itu Visi Kota Tasikmalaya juga harus selaras dengan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang direncanakan, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi termaju di Indonesia”

Visi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan aspirasi dari seluruh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Selain itu Visi Kota Tasikmalaya juga tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini perencanaan pembangunan Jawa Barat dan Nasional).

Adapun Visi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 disepakati sebagai berikut:

**“Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan
dan Industri Termaju di Jawa Barat”**

Penjelasan dari Visi Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari berbagai hal di bawah ini:

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.
3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.

4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri.

B. MISI

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
TAHUN 2005 – 2025

A. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya

Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

a. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat dalam usaha mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya. Hal ini akan tercipta apabila seluruh aparat pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang baik, dengan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder*, dan bisa mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan pemerintahannya kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan tupoksi yang baik akan tercipta apabila terjadi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi ini dapat tercapai melalui:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah; serta
- 3) Penguatan lembaga legislatif.

b. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ada 3 fungsi penting pemerintah dalam penyediaan barang publik, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi, Pemerintah Daerah berkewajiban

untuk menyediakan prasarana dan sarana publik yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakatnya. Ketersediaan prasarana dan sarana yang mencukupi ini harus juga memperhatikan aspek keadilan dan keterjangkauan masyarakat dalam menikmati prasarana dan sarana tersebut.

Berbagai prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk mencapai visi Kota Tasikmalaya yang telah disepakati adalah:

- 1) Pemenuhan kebutuhan akan prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah;
- 2) Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya secara layak;
- 3) Tersedianya prasarana sistem persampahan dan sistem perpipaan air bersih untuk lebih dari 80% masyarakat Kota Tasikmalaya;
- 4) Terciptanya sistem pelayanan jasa publik yang transparan, handal dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.

Terwujudnya masyarakat yang agamis, berakhlak, beradab, berbudaya dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal sangat penting eksistensinya karena akan menciptakan keharmonisan dan suasana hidup yang dinamis. Kehidupan beragama sangat penting karena dapat dijadikan pegangan dalam menentukan arah pembangunan daerah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Karakter masyarakat di Kota Tasikmalaya akan muncul dan dapat berakar erat seiring dengan kemajuan-kemajuan pembangunan daerah secara fisik.

Oleh karena itu semua elemen masyarakat harus mampu mengakses sarana aktivitas dan wadah partisipasi yang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Keharmonisan antar golongan masyarakat harus terus digalakan dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam berbagai kegiatan agama, sosial dan budaya.

d. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektornya. Perwujudan Visi Kota Tasikmalaya didukung oleh karakteristik masyarakat yang dikenal sebagai wirausahawan yang tangguh. Kondisi tersebut akan dapat terwujud jika ada dorongan dan

fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman selama ini, belanja pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga alokasi kegiatan belanja pemerintah harus ditekankan pada upaya-upaya pengembangan jiwa *entrepreneurship* dari para pelaku ekonomi di Kota Tasikmalaya.

e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Indeks ini ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai, peningkatan wajib belajar di atas sembilan tahun dan kemampuan ekonomi yang diatas tingkat subsistensinya. Hal ini selaras dengan tujuan dari *Millenium Development Goals* yang berisi 8 tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu;
- 6) Mencegah dan menanggulangi penyakit menular (seperti HIV/AIDS, TBC, Flu Burung);
- 7) Menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

f. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menjaga kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, air dan hutan, sehingga terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan daya tahan lingkungan yang pada akhirnya akan mampu mengantisipasi dampak yang timbul dari ketidakseimbangan ekosistem yang mungkin terjadi di masa mendatang.

g. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

Revitalisasi prasarana dan sarana pariwisata sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan aktivitas pariwisata di Kota Tasikmalaya. Regulasi dan program-program harus memberikan iklim yang kondusif sehingga mampu mewujudkan kenyamanan berinvestasi bagi pelaku

bisnis di sektor pariwisata. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan sektor pariwisata.

Pusat-pusat budaya dan kesenian masyarakat juga harus mendukung dan memberikan nuansa lain sehingga Kota Tasikmalaya mampu memiliki *tourism attractiveness* yang khas dalam pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.

2. Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Tasikmalaya

Arah perkembangan wilayah tidak terlepas dari perkembangan penduduknya. Dengan laju pertumbuhan penduduk kota sebesar 2,11% berdasarkan tabel 3.1. penduduk Kota Tasikmalaya diprediksi akan mencapai angka sebesar 944.732 jiwa (atau kurang lebih sebesar 1 juta jiwa). Oleh karenanya Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 menuju kota metropolitan. Pembangunan kota yang berkelanjutan mensyaratkan agar prinsip-prinsip pembangunan kota harus berwawasan dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu sebisa mungkin pembangunan kota tidak mengganggu lahan hutan dan sawah irigasi. Dari kondisi tersebut diprediksi perkembangan kota hanya akan menempati tambahan 30,2% sisa lahan kota yang ada atau seluas 5.181,33 Ha (hingga tahun 2005 wilayah terbangun sudah mencapai 23,02%). Dengan kata lain jumlah wilayah terbangun kota akan mencapai 53,22% pada tahun 2025.

Tabel 4.1.
Proyeksi Penduduk Kota Tasikmalaya
dan Kemungkinan Pengembangan Lahan Kotanya

Kecamatan	2005	LPP 90-05	2010	2015	2020	2025	Lahan yang mungkin dikembangkan (ha)
Kawalu	82.332	1,76	89.837	98.026	106.961	116.711	1.400,50
Tamansari	58.292	0,02	58.350	58.409	58.467	58.526	1.456,34
Cibeureum	93.671	3,21	109.702	128.476	150.464	176.214	700,20
Tawang	65.957	0,44	67.421	68.917	70.447	72.010	36,12
Cihideung	71.829	0,01	71.865	71.901	71.937	71.973	63,45
Mangkubumi	77.337	4,53	96.514	120.447	150.315	187.589	414,13
Indihiang	82.379	2,58	93.569	106.278	120.714	137.110	638,77
Cipedes	76.486	2,47	86.410	97.622	110.289	124.600	471,83
Jumlah	608.283	2,11	673.668	750.076	839.593	944.732	5.181,33

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2006

Berdasarkan tabel 3.1. terlihat bahwa tanpa ada kebijakan dari pemerintah kota, Kecamatan Mangkubumi akan mengalami tekanan penduduk yang terbesar, yang merupakan dampak dari perkembangan di pusat kota. Di satu sisi kecamatan tersebut memiliki kendala pada luas ketersediaan lahan yang mungkin dikembangkan. Kecamatan lain yang akan mengalami tekanan penduduk adalah Kecamatan Indihiang dan Cipedes (arah utara Kota

Tasikmalaya), hal ini didasarkan pada potensi lahan yang bisa dikembangkan sebagai wilayah terbangun. Jika hal ini dibiarkan terus maka kemungkinan besar akan terjadi disparitas antara wilayah utara – selatan Kota Tasikmalaya.

Meskipun Kecamatan Cibeureum memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (kedua, setelah Mangkubumi) akan tetapi perkembangannya terkendala oleh aspek alam (banyaknya sungai di wilayah tersebut yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah lingkungan). Selain itu jika arah pertumbuhan penduduk di kecamatan ini tidak dikendalikan, maka kondisi ketimpangan utara-selatan Kota Tasikmalaya akan semakin parah.

Berdasarkan potensi lahan, sebenarnya Kecamatan Tamansari dan Kawalu memiliki potensi untuk menjadi area perluasan kota di masa yang akan datang. Hanya saja ini perlu peran serta pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang mencukupi agar pola persebaran penduduknya dapat terdorong ke kedua kecamatan tersebut. Selain itu perlu juga dipertimbangkan faktor mitigasi bencana di kedua kecamatan tersebut, karena berdasarkan Gambar 2.3 sebagian dari area wilayah tersebut memiliki gerakan tanah yang cukup tinggi.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengembangan kota ke arah Kecamatan Tamansari dan Kawalu, diantaranya adalah:

- a. Pemerintah Kota Tasikmalaya secara konsisten melaksanakan RTRW kota yang telah dibuat pada tahun 2004, dimana pembagian kota didasarkan pada 5 BWK, dengan masing-masing fungsinya.
- b. Dibuat suatu kebijakan untuk memekarkan dua kecamatan tersebut agar kondisi pemerintahan di Kecamatan Tamansari dan Kawalu dapat merubah pola perkembangan penduduk, karena dari cakupan pemeritahan hal itu sangat memungkinkan.
- c. Menambah prasarana dan sarana yang ada ke arah dua kecamatan tersebut agar penduduk bisa tertarik ke dua kecamatan tersebut. Penambahan ini dimungkinkan karena akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut, misalkan untuk Kecamatan Kawalu karena basis industri kecilnya cukup baik maka perlu disediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas kegiatan tersebut.
- d. Berdasarkan potensi lahannya, kedua daerah tersebut masih mencukupi untuk menampung peningkatan penduduk kota, dan ini akan berdampak pada adanya keseimbangan dan pemerataan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya.

Perwujudan Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 sangat ditentukan pula oleh perencanaan tata ruang wilayah kota. Penataan ruang dan wilayah hingga tahun 2025 diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan kota dalam konteks regional dan nasional, yang tujuannya:

- a. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai yang ada;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, maka secara khusus diidentifikasi sebagai hutan kota atau hutan konservasi.
- b. Kawasan perlindungan setempat, yang dalam hal ini adalah sempadan sungai, kawasan sekitar situ dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Kawasan budidaya didasarkan pada dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan akan dikembangkan di kawasan tersebut. Adapun penggolongan kawasan budidaya dalam RTRW Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Kawasan budidaya yang berfungsi lindung;
- b. Kawasan pusat kota;
- c. Kawasan perdagangan dan jasa regional;
- d. Koridor perdagangan dan jasa;
- e. Kawasan pemerintahan;
- f. Kawasan pendidikan;
- g. Kawasan kesehatan;
- h. Kawasan terminal;
- i. Kawasan perumahan dan permukiman;
- j. Kawasan industri;
- k. Kawasan pergudangan;

- l. Sarana fasilitas umum dan sosial;
- m. Sarana rekreasi dan olahraga;
- n. Kawasan militer;
- o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
- p. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk menunjang perkembangan kota yang terarah dan efisien serta memiliki tingkat pelayanan yang baik, maka Kota Tasikmalaya dibagi menjadi bagian-bagian wilayah kota. Pertimbangan dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:

- a. Homogenitas dan intensitas perkembangan BWK yaitu konsentrasi dominasi guna lahan saat ini.
- b. Pola jaringan jalan dan pola pergerakan yaitu aksesibilitas yang baik
- c. Pusat lingkungan (Pusat BWK/Pusat Sub BWK) ditentukan berdasarkan banyaknya fasilitas dan utilitas yang dimiliki.
- d. Beberapa pusat lingkungan dialokasikan berdasarkan fungsi eksisting sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- e. Pusat-pusat tersebut mengakomodasikan fungsi Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan.

Adapun Wilayah Kota Tasikmalaya dalam RTRW Kota tahun 2004 dibagi menjadi 5 BWK dan 10 sub BWK, dimana pembagian wilayah dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. BWK I, mencakup sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang serta sebagian Kec. Cipedes.
- b. BWK II, meliputi sebagian Kec. Cipedes, sebagian Kec. Cibeureum. Dalam BWK II terbagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK II A dengan fungsi sebagai perkantoran skala lingkungan dan perumahan.
 - 2) BWK II B dengan fungsi sebagai wisata/rekreasi, perdagangan lokal, perangkutan regional dan perumahan.
- c. BWK III, meliputi sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Cibeureum, sebagian Kec. Tamansari dan sebagian Kec. Kawalu. Dalam BWK III ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK III A dengan fungsi perkantoran, industri kecil, perumahan menengah, pertokoan lokal, perdagangan dan perumahan.
 - 2) BWK III B dengan fungsi militer, industri kecil dan menengah.
 - 3) BWK III C dengan fungsi perumahan, pendidikan.

- d. BWK IV, meliputi sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Cihideung. Dalam BWK IV ini di bagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK IV A dengan fungsi industri menengah dan besar.
 - 2) BWK IV B dengan fungsi perumahan dan cadangan pengembangan.
- e. BWK V, meliputi sebagian Kec. Cipedes, Kec. Indihiang, Kec. Mangkubumi, serta sebagian Kec. Cihideung. BWK V ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK V A, dengan fungsi perdagangan regional, perumahan, perkantoran, transportasi regional.
 - 2) BWK V B, dengan fungsi wisata, perumahan.
 - 3) BWK V C, dengan fungsi perumahan dan pergudangan.

B. TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN SKALA PRIORITAS

Tahapan dan skala proritas pembangunan, merupakan refleksi strategis yang akan menjadi agenda dan acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan pembangunan lainnya serta sebagai harapan yang akan dicapai. Prioritas pada tiap pentahapan, akan berbeda namun tetap ada keterkaitan dan berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Setiap pentahapan / periode tersebut mengagendakan makna prioritasisasi berdasarkan tingkat kepentingan dan strategis.

Pentahapan dalam kerangka RPJP Daerah ini dibagi kedalam 4 (empat) periode 5 tahunan. Dimana pada setiap tahapan akan berdasarkan pada sasaran pokok yang secara strategis tertuang dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan dan harapan yang akan dicapai pada periode tersebut. Periode 5 tahunan dalam tahapan RPJP Daerah ini tidak identik dengan kurun waktu RPJM Daerah. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berbeda dengan tahapan dalam RPJP Daerah yang harus mengacu pada tahapan RPJP Nasional. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama disusun sebagai berikut.

1. Tahap ke-1 (2005 – 2009)

Untuk mewujudkan visi Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah peletakan dan penataan dasar pembangunan yang kuat atau

pada tahap ke-1 ini disebut **Tahap Penataan Landasan Pembangunan Kota**. Untuk menjadi sebuah kota perdagangan dan industri yang maju tentunya harus ditopang landasan utama pembangunan atau fondasi yang kuat. Landasan utama pembangunan terletak pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang kuat. Dimana IPM ini bertitikberat pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli. Disamping IPM sebagai prioritas utama dalam tahap ini juga didukung oleh pembangunan sektor lain yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta, terutama infrastruktur jalan sebagai akses dalam pembangunan sektor lainnya serta pembuatan ***masterplan tata ruang yang terpadu*** untuk jangka panjang dalam rangka mempersiapkan sebuah kota yang maju
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, ditandai dengan tidak adanya bangunan sekolah yang rusak dan perintisan program wajib belajar 12 tahun serta biaya pendidikan yang terjangkau dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, ditandai dengan mudahnya akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat
- d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya pendapatn perkapita, menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian dana bergulir, kredit lunak dan kegiatan padat karya dalam upaya meningkatnya daya beli masyarakat serta pemberian jaminan sosial oleh pemerintah. Pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan memberikan insentif bagi para investor dalam upaya membuka lowongan pekerjaan
- e. Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya konsistensi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta tegaknya supremasi hukum.
- f. Intensifikasi sektor pertanian, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meminimalkan bencana mewujudkan lingkungan yang indah, asri dan sehat
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal

pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi

2. Tahap ke-2 (2010 – 2014)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Tahap ke-1, Tahap ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Tasikmalaya di segala bidang dengan tetap masih menekankan pada pemantapan landasan pembangunan kota atau disebut **Tahap Pemantapan Landasan Pembangunan Kota**. Tahap ini masih memprioritaskan dan meningkatkan pencapaian angka IPM masyarakat Kota Tasikmalaya, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk lebih meningkatkan akses dan mobilisasi dikembangkan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikut serta peran serta masyarakat dan sektor swasta
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tersedianya fasilitas pendidikan yang maju dan berbasis teknologi informasi, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dengan biaya pendidikan yang terjangkau dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berwawasan global dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa
- c. Sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan semakin membaik, dimana pelayanan kesehatan mudah diakses dengan biaya yang terjangkau
- d. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, diiringi oleh meningkatnya daya beli, menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- e. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penegakan hukum semakin meningkat, pelayanan publik lebih berkualitas, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.
- f. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri kecil dan menengah serta berdirinya kawasan perdagangan serta sektor jasa yang didukung oleh investasi yang terus meningkat sejalan dengan penguatan pembangunan sektor pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terpantau
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak

membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi

3. Tahap ke-3 (2015 – 2019)

Hasil dari evaluasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Tahap ke-2, Tahap ke-3 disebut **Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat**. Tahap ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur kota diarahkan ke sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa dalam upaya mempercepat dan lebih meningkatkan akses serta mobilisasi pelaku dan masyarakat, peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikutserta peran serta masyarakat dan sektor swasta
- b. Kualitas sumber daya manusia semakin membaik, cerdas, berwawasan global yang berbasis keunggulan lokal dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat. Teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan penuntasan program wajib belajar 12 tahun
- c. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat semakin meningkat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik.
- d. Masyarakat yang terus membaik tingkat kesejahteraannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lainnya di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan jaminan sosial dari pemerintah. Daya beli semakin meningkat, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin menurun
- e. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya serta kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat.
- f. Perekonomian yang berdaya saing semakin kuat dan kompetitif perlu

dukungan pengembangan sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah serta sektor jasa dukungan investasi yang terus meningkat, semakin banyak berdirinya sentra industri kecil dan menengah, kawasan perdagangan serta sektor jasa sejalan dengan peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai penopang ketahanan pangan

- g. Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang baik.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi

4. Tahap ke-4 (2020 – 2024)

Pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ke-3 akan terus berlanjut pada tahap ke-4 yang disebut **Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat**. Tahap ke-4 ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah.
- b. Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi.
- c. Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses
- d. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun

- e. Struktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan
- f. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat.
- g. Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kota Tasikmalaya, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan hingga tahun 2025. RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJM Daerah serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya hingga tahun 2025. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visinya perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis;
2. Ketata-pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Konsistensi kebijakan pemerintah kota;
4. Keberpihakan kepada ekonomi rakyat;
5. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; dan
6. Mekanisme kontrol dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas pada publik yang baik.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT